

**PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Oleh : Rahman Mulyawan Drs.,M.Si

ABSTRAK

Persepsi atau pandangan mahasiswa di lingkungan Universitas Padjadjaran terhadap Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sangat beragam. Mata Kuliah ini selain dipahami dan ditanggapi secara berbeda-beda oleh para mahasiswa, ternyata kegiatan proses belajar dan mengajar mata kuliah inipun turut diamati serta dikritisi oleh mahasiswa kepada para pengajar dari mata kuliah tersebut. Secara garis besar mahasiswa di lingkungan di Universitas Padjadjaran menilai keberadaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan melalui status, proses belajar dan mengajar serta buku pegangan yang berisi berbagai pokok bahasan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada dasarnya mahasiswa memiliki persepsi bahwa mata kuliah ini terlalu dipaksakan untuk diikuti oleh mahasiswa dan berbau doktrin. Selain itu dalam proses belajar dan mengajar mahasiswa berpendapat bahwa dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan harus konsisten dan mampu dalam menyampaikan misi yang ada dalam buku yang menjadi pegangan mahasiswa. Persepsi yang terakhir adalah mengenai pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah yang perlu untuk direvisi sehubungan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal tersebut di atas mengindikasikan persepsi mahasiswa yang bernuansa perubahan terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan secara komprehensif-integral.

Kata-kata Kunci

Persepsi, Proses Belajar dan Mengajar, Pendidikan, Kewarganegaraan, Warganegara, Negara, Doktrin, Hak dan Kewajiban, Buku Ajar, Pokok Bahasan, Demokrasi

Pendahuluan

Pada saat ini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semakin dipahami secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Bagi sebagian ahli, mata kuliah Kewarganegaraan ini diidentikkan dengan pendidikan demokrasi (*democracy education*). Disini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mencakup kajian dan pembahasan tentang wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, dan hak serta kewajiban warganegara. Sementara bagi sebagian ahli lain, mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan disebut *citizenship education* yang muatannya memberikan penekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam masyarakat madani.

Di Indonesia, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi. Keberadaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini menjadi sarana dan sumber pembelajaran tentang hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara, ternyata saat ini banyak dinilai oleh berbagai kalangan tidak sejalan dengan semangat tuntutan demokratisasi dan pembentukan warganegara yang cerdas serta berkeadaban.

Untuk mencapai tujuan yang ideal dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan adanya usaha atau strategi pembelajaran yang mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi mahasiswa dan dosen terhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*) dengan karakternya yang demokratis, egaliter dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pendapat Mahasiswa terhadap Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dari penelitian yang pernah dilakukan penulis (tahun 2005) terhadap mahasiswa di lingkungan Universitas Padjadjaran mengenai keberadaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. materi pendidikan kewarganegaraan terlalu indoktrinatif sehingga mahasiswa lebih cenderung menghafal daripada menghayati.
2. mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat bernuansa militeristik, dogmatis serta cenderung membentuk patriotisme secara paksa melalui mata kuliah yang bersifat wajib untuk ditempuh.
3. terpakunya sumber pembelajaran terhadap satu buku, serta sulit untuk menemukan sumber rujukan lainnya.
4. orientasi mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan banyak yang tidak relevan lagi dengan semangat dan tuntutan demokrasi, reformasi, penegakkan HAM dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan masyarakat madani.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, para mahasiswa mengharapkan agar mata kuliah ini direvisi materi dan metode pembelajarannya sehingga mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat diminati oleh para mahasiswa. Beberapa masukan dari mahasiswa untuk meningkatkan kualitas mata kuliah tersebut diantaranya adalah bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan **harus** :

1. memberikan pendidikan yang berorientasi pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. memberikan ruang pada pluralitas berfikir para mahasiswa.
3. menumbuhkan sikap kritis, kreatif, sensitivitas, partisipatif dan mempunyai tanggung jawab dalam berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan pada mahasiswa.
4. menekankan pembelajaran dengan metodologi yang akomodatif, egaliter dan demokratis.
5. menumbuhkan nasionalisme dan kesadaran akan hak serta kewajiban warga negara.

6. berorientasi non-militeristik
7. tidak bersifat indoktrinasi dan dogmatis.

Core Materials yang Ideal

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan perlu memilih *core materials* yang tepat dalam arti dengan mempelajari *core materials* tersebut mahasiswa akhirnya mampu melakukan *transfer of learning*, *transfer of values*, dan *transfer of principles* agar mereka benar-benar memiliki bekal untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk dapat menentukan *core materials* dengan baik, kita dapat mengadopsi pendapat Tyler (1949) dalam menyusun suatu kurikulum untuk kepentingan pembelajaran dengan merumuskan empat pertanyaan, yaitu :

1. *What educational purposes should the school seek to attain ?*
2. *What educational experiences can be provided that are likely to attain these purpose ?*
3. *How can these edicational experiences be effectively organized ?*
4. *How can use we determine whether these purpose are being attained ?*

Dengan mengadopsi pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Tyler tersebut kita perlu menjawabnya agar dapat melahirkan *core materials* bagi proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam rangka menjawab pertanyaan Tyler tersebut, kita dapat mengadopsi pendapat Print (1999) agar bisa melahirkan *core materials* bagi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jika kita buat daftar, berikut ini adalah pendapat Print yang terkait dengan bahan yang perlu diajarkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berstatus sebagai *Civic Education*, yaitu :

1. hak dan kewajiban warga negara.
2. sistem pemerintahan dan lembaga-pemerintahan.
3. sejarah dan UUD.
4. identitas nasional.
5. sistem hukum dan negara hukum
6. hak-hak warga negara dalam aspek kemanusiaan, politik, ekonomi dan sosial.
7. proses dan prinsip-prinsip demokrasi.
8. partisipasi aktif warga negara dalam isu-isu kenegaraan.
9. perspektif internasional.
10. nilai-nilai kewarganegaraan yang demokratik.

Meskipun demikian, *core materials* seperti tersebut di atas masih perlu dikembangkan secara kontekstual dalam arti kita harus melihat persoalan bangsa dalam jangka panjang.

Persepsi Mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu objek yang diteliti dalam penelitian yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa Unpad (jumlah responden sebanyak 300 orang) terhadap Buku Ajar Pendidikan

Kewarganegaraan ini adalah materi atau pokok bahasan dalam buku Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengacu pada rambu-rambu yang termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Pada umumnya mahasiswa Unpad berpendapat bahwa materi atau pokok bahasan dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan disampaikan oleh Dosen sangat bervariasi dari disampaikan *kurang utuh* hingga disampaikan *sangat utuh*. Salah satunya seperti materi *Filsafat Pancasila, Negara dan Konstitusi, Geopolitik serta Geostrategi* dapat dikelompokkan sebagai materi yang disampaikan kurang utuh kepada mahasiswa. Hal ini diindikasikan dengan tidak tuntasnya pembahasan dari pokok bahasan yang dimaksud serta adanya materi yang disampaikan secara kurang tersusun (ada materi yang dilewat) dengan alasan untuk mempersingkat pertemuan atau menganggap mahasiswa sudah tahu dan faham terhadap materi yang tidak disampaikan tersebut.

Penilaian Dosen terhadap Mahasiswa bahwa materi tersebut telah dianggap tahu mengingat materi atau pokok-pokok bahasan tersebut sebagian telah disampaikan pada saat mahasiswa berada di bangku SMU. Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah minimnya kegiatan diskusi atau tanya jawab antara dosen dan mahasiswa dalam membahas materi tersebut.

Lain halnya dengan materi *Pengantar/Pendahuluan, Identitas Nasional serta Demokrasi Indonesia* yang dapat dikategorikan sebagai materi yang *disampaikan utuh*. Mahasiswa berpendapat materi ini disampaikan runtut tersusun sesuai dengan materi yang ada di buku. Di dalam materi inipun mahasiswa dengan dosen melakukan diskusi secara terbuka guna membahas segala permasalahan yang ada dalam materi tersebut. Namun demikian, materi yang disampaikan mudah untuk difahami oleh mahasiswa.

Sedangkan materi *Hak dan Kewajiban Warganegara, Hak Azasi Manusia serta Rule of Law (Supremasi Hukum)* dapat dikategorikan sebagai materi yang disampaikan sangat utuh, hal ini diindikasikan dengan adanya kegiatan diskusi kelompok atau seminar kecil yang disertai tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen dan antara mahasiswa anggota kelompok penyaji dengan mahasiswa penanggap. Selain itu kegiatan diskusi kelompok ini banyak mengupas tuntas segala permasalahan yang berkaitan dengan materi yang ada dalam buku pegangan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kondisi ini dapat diterima mengingat materi atau pokok bahasan HKWN, HAM dan Rule of Law sangat berkaitan dengan wacana atau aspek-aspek faktual dan yang aktual yang sedang terjadi di masa kini guna mencari alternatif pemecahan masalahnya.

Keterangan selengkapnya mengenai penyampaian materi oleh Dosen dapat diketahui melalui tabel berikut ini.

Tabel 1
Penyampaian Pokok-pokok Bahasan
yang ada dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan
(dalam %)

Keterangan Jawaban :

- Disampaikan sangat utuh (5)**
- Disampaikan utuh (4)**
- Disampaikan cukup utuh (3)**
- Disampaikan kurang utuh (2)**
- Tidak Disampaikan (1)**

NO	POKOK BAHASAN	5	4	3	2	1	Jml
1	Pengantar / Pendahuluan	42,33	47,00	10,66	---	---	100
2	Filsafat Pancasila	38,33	52,00	9,66	---	---	100
3	Identitas Nasional	28,00	35,00	37,00	---	---	100
4	Demokrasi Indonesia	39,66	48,66	11,66	---	---	100
5	Hak dan Kewajiban Warganegara	29,66	38,33	25,66	6,33	---	100
6	Hak Azasi Manusia	32,33	43,66	16,33	7,66	---	100
7	Negara dan Konstitusi	27,66	44,66	17,33	10,33	---	100
8	<i>Rule of Law</i>	24,66	43,00	20,00	12,33	---	100
9	Geopolitik Indonesia	13,66	39,33	24,67	22,33	---	100
10	Geostrategi Indonesia	10,66	32,00	27,00	23,33	7,00	100

Dalam tabel selanjutnya (Tabel 2) yang menanyakan tentang kelayakan dan kompetensi materi dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa materi ***Geopolitik serta Geostrategi perlu dikurangi*** materinya sehubungan sulit untuk difahami, untuk itu materi ini perlu disampaikan secara sederhana agar mudah difahami oleh mahasiswa. Namun salah satu penyebab utama adanya kelemahan materi ini sehingga perlu dikurangi, dikarenakan minimnya jumlah pertemuan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa dalam membahas materi yang berkaitan dengan Geopolitik dan Geostrategi.

Lain halnya dengan materi Filsafat Pancasila dan Identitas Nasional, walaupun masuk dalam kategori materi yang perlu dikurangi namun alasan dan penyebabnya sangat berbeda dengan materi Geopolitik dan Geostrategi. Materi Filsafat Pancasila dan Identitas Nasional perlu dikurangi mengingat mahasiswa menganggap bahwa materi tersebut telah pernah diajarkan di bangku SLTP dan SLTA.

Materi atau Pokok Bahasan Pengantar/Pendahuluan serta Negara dan Konstitusi dapat dikategorikan sebagai materi yang perlu disempurnakan dan dilengkapi. Hal ini muncul dikarenakan mahasiswa beranggapan bahwa materi tersebut sering tumpang tindih dengan materi lainnya sehingga memunculkan adanya anggapan materi tersebut terlalu minim dan perlu ditambah atau dilengkapi.

Hal lain yang menarik dari hasil penelitian berdasarkan kelayakan dan kompetensi isi materi Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah bahwa materi Demokrasi Indonesia, Hak dan

Kewajiban Warganegara, Hak Azasi Manusia dan Rule of Law dikategorikan materi yang harus dipertahankan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Hal ini muncul dikarenakan mahasiswa beranggapan bahwa perkembangan situasi dan kondisi di Indonesia yang terus berubah secara fluktuatif (naik – turun) tidak menentu, sehingga menyebabkan materi-materi tersebut di atas perlu dipertahankan dengan memperhatikan kondisi kekinian.

Dalam tabel 2 secara garis besar melalui persentase terbesar dari setiap aspek materi atau pokok bahasan dapat diketahui 41,67 responden menginginkan materi Pengantar/Pendahuluan untuk dipertahankan. Sebanyak 31,33 % responden menginginkan materi Filsafat Pancasila untuk disempurnakan atau dilengkapi materinya. Sebanyak 38,66 % responden menginginkan materi Identitas Nasional untuk disempurnakan atau dilengkapi. Sebanyak 48,00 % responden menginginkan materi Demokrasi Indonesia untuk dipertahankan. Sebanyak 51,66 % responden menginginkan materi Hak dan Kewajiban Warganegara untuk disempurnakan atau dilengkapi. Sebanyak 50,66 % responden menginginkan materi Hak Azasi Manusia untuk dipertahankan. Sebanyak 50,00 % responden menginginkan materi Negara dan Konstitusi untuk disempurnakan. Sebanyak 50,66 % responden menginginkan materi Rule of Law untuk disempurnakan. Sebanyak 49,00 % responden menginginkan materi Geopolitik Indonesia disempurnakan. Dan sebanyak 44,00 % responden menginginkan materi Geostrategi Indonesia untuk disempurnakan. Selengkapnya mengenai tanggapan responden terhadap keberadaan dan kompetensi pokok-pokok bahasan yang ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Keberadaan dan Kompetensi Pokok-pokok Bahasan
Yang ada dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan
(dalam %)

Keterangan Jawaban :

Dipertahankan	(5)
Disempurnakan / dilengkapi	(4)
Dikurangi	(3)
Dipertimbangkan kembali keberadaannya	(2)
Dihilangkan / diganti	(1)

NO	POKOK BAHASAN	5	4	3	2	1	Jml
1	Pengantar / Pendahuluan	41,67	22,67	15,66	20,00	---	100
2	Filsafat Pancasila	23,00	31,33	21,00	16,00	---	100
3	Identitas Nasional	29,00	38,66	15,33	17,00	---	100
4	Demokrasi Indonesia	48,00	41,66	10,33	---	---	100
5	Hak dan Kewajiban Warganegara	39,66	51,66	8,66	---	---	100
6	Hak Azasi Manusia	50,66	44,33	5,00	---	---	100
7	Negara dan Konstitusi	42,33	50,00	7,66	---	---	100
8	<i>Rule of Law</i>	43,66	50,66	5,66	---	---	100
9	Geopolitik Indonesia	25,33	49,00	13,66	12,00	---	100
10	Gestrategi Indonesia	24,33	44,00	17,66	14,00	---	100

Evaluasi Pembelajaran

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang harus mengutamakan aspek sistem nilai. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran tekanan utama harus pada aspek afektif. Dengan demikian kesadaran akan pentingnya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab disertai dengan perbuatan nyata merupakan aspek yang amat penting jika dibandingkan penguasaan aspek kognitif. Oleh karena itu pembelajaran yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan analisis, sintesis dan evaluasi terhadap persoalan-persoalan kewarganegaraan dalam kerangka untuk melakukan *values clarification* menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini membawa implikasi bahwa evaluasi dengan pendidikan paper and pencil test tidak akan mampu mengungkap hasil pembelajaran dengan valid. Sebagai komplementasinya, perlu ada sistem evaluasi yang mampu memberi feedback bagi mahasiswa untuk melakukan refleksi bagi nilai-nilai dan keyakinan yang telah dimiliki berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan. Evaluasi yang demikian dapat dicari dengan cara melakukan *self evaluation*, *reading report*, simulasi dan *peer evaluation*. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk menumbuhkan sistem nilai seperti dimilikinya sifat-sifat toleransi, *empaty*, disiplin, bertanggung jawab, suka menolong, menghargai perbedaan pendapat dan sebagainya, dan bukannya sekedar untuk mengetahui ingatan dan hafalan mahasiswa mengenai bahan-bahan yang telah diajarkan secara kognitif.

Dengan model evaluasi ini pada akhirnya akan membantu mahasiswa untuk membangun sistem nilai perorangan, sistem nilai kelompok, dan sistem nilai kebangsaan.

Rekomendasi

1. Keberadaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum di perguruan tinggi perlu ditinjau ulang keberadaan dan komponen pembelajarannya.
2. Pengembangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus menerus dilakukan pengkajian secara intensif melalui berbagai forum ilmiah dari berbagai kalangan dalam rangka menemukan dasar *ontologis*, *epistemologis* dan *axiologis*, sehingga dapat didapat dasar pijakan filosofisnya.

Daftar Pustaka

Krippendorff, K (1993), **Analisa Isi : Pengantar Teori dan Metodologi** (terjemahan), Jakarta : Raja Grafindo Persada

Mulyawan, Rahman (2005), **Pendapat Mahasiswa UNPAD terhadap Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan** (Laporan Penelitian Mandiri), Bandung, LP-UNPAD.

National Council for the Social Studies (1994), **The Curriculum Standards for Social Studies**, Washington DC : NCSS

Print, M (1999), **“Civic Education and Civil Society in The Asia-Pacific” in Civic Educational for Civil Society**, (Ed) Murry Print, James Ellickson – Brown et.al, England : Asean Academic Press Ltd.

Soedjito, (1988), **Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa**, Jakarta : Balai Pustaka

Sumaatmadja, N., (1984), **Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**, Bandung : Alumni